

**Kekuatan dan Pemberdayaan Organisasi Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Kasus di Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Aceh)**

Ahyar¹, Saidaturrahmah², Yusnadi³, Hasrat Efendi Samosir⁴

^{1,2}IAI Al-Aziziyah Samalanga

³Universitas Negeri Medan

⁴UIN Sumatera Utara Medan

ahyar@iaialaziziyah.ac.id¹, ummihaya89@gmail.com², yusnadi@unimed.ac.id³,
hasratefendisamosir@gmail.com⁴

Abstract

Gampong Mee Panyang Busu is one of the gampongs in the Mutiara sub-district, Kab. Pidie. So in this study, the author will explore the mechanism of the Keusyik (Village Head) of Gampong Mee Panyang Busu in building strength and empowering Gampong organizations, thus improving the welfare of the community. The focus of the case study is in Gampong Mee Panyang Busu, Mutiara District, Pidie Regency, Aceh Province. The method used in this research is a descriptive qualitative research method. In which the author attempts to describe the strength and empowerment of Gampong organizations in advancing the nation and improving the welfare of the people of Gampong Mee Panyang Busu, Mutiara District, Pidie Regency, Aceh Province. The results found the following points: namely by maximizing the duties and functions of Gampong apparatus/equipment by delegating tasks to each position, preparing superior Gampong empowerment programs, and realizing each activity program that has been mutually agreed upon.

Keywords: Strength, Empowerment, Gampong, Welfare, Community

1. PENDAHULUAN

Desa (Gampong dalam istilah kultur Aceh), adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik (Kepala Desa) atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri menurut Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2003. Gampong Mee Panyang Busu adalah salah satu Gampong dalam Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Seperti pemerintahan Gampong lainnya, dalam struktur pemerintahan Gampong Mee Panyang Busu dipimpin oleh Geusyiek (Kepala Desa) sebagai kepala pemerintahan, dan dibantu perangkat serta aparatur Gampong.

Secara Hirarki organisasi pemerintahan Gampong di Aceh berada dalam ruang lingkup Kemukiman dalam setiap Kecamatan. Pemerintahan Gampong memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat menurut aturan dan norma-norma yang berlaku. Maka sebagai salah satu organisasi pemerintahan terbawah dalam melakukan tugas dan fungsinya, aspek komunikasi berperan penting dalam

menunjang berbagai kegiatan organisasi pemerintahan. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah sebagai penghubung interaksi sesama perangkat Gampong dan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Menariknya adalah, pemerintahan Gampong menjadi satu-satunya organisasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek dan lini kehidupan.

Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan. Sedangkan menurut Paul C. Bartholomew mendefinisikan organisasi sebagai suatu susunan yang agaknya logis dari bagian-bagian yang saling tergantung untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan mana kekuasaan dan kontrol dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu (Sutarto, 2006). Pengertian yang terakhir ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi (termasuk organisasi pemerintahan) memiliki sebuah kekuatan/kekuasaan yang dapat mengontrol segala sesuatu demi sebuah tujuan tertentu yang akan dicapai, terlebih pada aspek pemberdayaan masyarakatnya (Mathis and Jackson, 2011).

Organisasi Pemerintahan Gampong Mee Panyang Busu, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan koordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya guna mempermudah dan menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif, selain kerjasama antar individu, kepala desa sebagai pemimpin menjadi sosok yang sangat penting dalam menentukan tugas-tugas kepada para bawahannya agar terciptanya tujuan yang diharapkan. Pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di pemerintahan dilakukan baik itu di dalam kelompok formal maupun informal untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi.

Maka dalam kajian ini, penulis akan menelusuri bagaimana mekanisme Geusiyik gampong Mee Panyang Busu dalam membangun kekuatan dan memberdayakan organisasi perangkat Gampong, sehingga meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Focus kajian kasusnya adalah di Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Alasan utama penulis memilih Gampong tersebut sebagai fokus kajian, karena Gampong Mee Panyang Busu merupakan satu-satunya dari 700-an Gampong di Kabupaten Pidie yang sudah memiliki Lembaga BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Memang hampir semua Gampong memiliki BUMG sendiri, tetapi BUMG Gampong Mee Panyang Busu sudah legal formal dan terdaftar serta teregistrasi pada Kementerian Desa. Sehingga Anggaran Gampong sudah dapat diplot untuk mengembangkan BUMG.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Di mana penulis berupaya mendeskripsikan tentang kekuatan dan pemberdayaan organisasi Gampong dalam memajukan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Praktisnya, penulis akan mendeskripsikan temuan penelitian dan apa saja yang berkembang selama terjadinya proses penelitian. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Indikator dalam penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2013).

Teknik pengumpulan yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang dikumpulkan langsung pada saat melakukan penelitian dilapangan, berupa data wawancara dan observasi. Dalam hal ini, informan yang dipilih antara lain adalah Keusyiek Gampong (Perangkat Desa), tokoh masyarakat, Pengelola BUMG, dan masyarakat setempat. Adapun data sekunder berasal dari publikasi-publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gampong Mee Panyang Busu

Gampong Mee Panyang Busu merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Gampong yang memiliki luas wilayahnya 210 Ha, terdiri dari dua dusun yakni dusun sejahtera utara dan dusun sejahtera selatan. Adapun jumlah penduduknya adalah sebanyak 465 jiwa dari 171 KK, yang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani atau pekebun. Berangkat dari data ini, suatu inovasi yang sangat bagus bila seorang Keusyiek (Kepala Desa) merencanakan pendirian BUMG (BUM Desa) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan harapan tentunya di kemudian hari, masyarakat Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara tidak hanya berprofesi sebagai petani/pekebun, tetapi juga mampu berbisaing di bidang usaha. Terutama bagi mereka yang masih usia muda, di mana secar usia masih sangat produktif.

Konsep Kekuatan dan Organisasi

Kekuatan atau juga disebutkan dengan kekuasaan difokuskan pada kemampuan perorangan untuk menentukan atau membatasi hasil-hasil. Definisi ini tidak hanya menyempitkan konsep kekuasaan, juga menuntut seseorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku khusus. Russell mendefinisikan kekuasaan sebagai hasil pengaruh yang diharapkan. Apakah kekuasaan hanya terjadi bila kekuasaan ini diharapkan? (Russell, 1986). Tradisi kekuasaan yang mendasar menyatakan beberapa pertanyaan utama.

“Apakah kekuasaan didistribusikan secara plural (meluas)’ atau dipegang oleh ‘kalangan atas’? Apakah kekuasaan disengaja atau tidak disengaja? Apakah kekuasaan terbatas pada pengambilan keputusan atau terbukti dalam hal-hal yang bukan pengambilan keputusan? Apakah tidak mengambil keputusan merupakan suatu tindakan atau bukan tindakan. Apakah kekuasaan suatu kemampuan untuk bertindak atau pelaksanaan tindakan (Clegg, 1989). Mintzberg tidak hanya mengemukakan keruwetan di seputar masalah konsep kekuasaan tetapi juga menyatakan bahwa dalam hal organisasi, lebih baik bila perhatian kita dipusatkan kepada siapa yang memperoleh kekuasaan, bagaimana dan mengapa memperolehnya, daripada membahas apakah kekuasaan itu (Mintzberg, 1983).

Konsep sentral dalam organisasi (khususnya organisasi besar) adalah suatu hierarki. Berbagai jenjang organisasi menggambarkan kekuasaan posisional. Seperti yang dikemukakan oleh Boulding, keputusan dibuat oleh para individu, tetapi dalam kebanyakan kasus keputusan dibuat atas nama entitas yang lebih besar. Ketika orang-orang naik hirarkinya, apa yang mereka putuskan dan atas nama siapa, menjadi semakin rumit. Ini menyatakan bahwa struktur organisasi sendiri memungkinkan dan sekaligus membatasi pelaksanaan kekuasaan. Jabatan memungkinkan orang untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tetapi pada saat yang sama keputusannya bukan keputusan individu karena persyaratan posisi tersebut (Boulding, 1989).

Mengorganisasikan adalah menciptakan hubungan-hubungan kekuasaan; sifat hubungan ini bergantung pada komunikasi. Bila kita dipaksa memilih faktor apa yang membedakan komunikasi organisasi dengan jenis komunikasi lainnya, kita akan memilih konsep kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa hubungan kekuasaan muncul dalam setiap interaksi, tetapi dalam organisasi hubungan ini menjadi lebih menonjol, terfokus, dan hadir dimana-mana. Dapat dikemukakan bahwa perbedaannya ada pada derajatnya dan bukan pada jenisnya. Dalam setiap segi, perbedaannya bukan hal sepele. Sudah tentu, sebagian dari kepentingandalam organisasi muncul dari struktur politis sebenarnya yang diwakili masing-masing. Peserta organisasi tidak bertindak dengan bebas dan mandiri. Disengaja atau tidak disengaja mereka bertindak dalam tekanan konteks yang rumit. Manajer pertengahan, kepala bagian, atau direktur merasakan dorongan dan tarikan bermacam-macam kepentingan.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing “*Empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau diserupakan dengan istilah pengembangan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya kekuatan, tenaga, dan berdaya dalam arti berkekuatan atau bertenaga. Secara istilah pemberdayaan adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada

teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya:

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat diartikan pula sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.

Mardikanto dan Soebiati mendefinisikan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah “Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”.

Filosofi pemberdayaan masyarakat dan paling banyak dikemukakan oleh berbagai pihak dan dalam banyak kesempatan bahwa “falsafah pemberdayaan masyarakat harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan

sosial dan mandiri sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Kelsey dan Hearne, 1995).

Mekanisme Pemberdayaan Organisasi Gampong Mee Panyang Busu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Memaksimalkan tugas dan fungsi aparatur/perangkat Gampong dengan pendelegasian tugas kepada masing-masing jabatan. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi para aparatur/perangkat Gampong. Karena pada umumnya para perangkat Gampong tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu diberikan pemahaman agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan menghadirkan petugas pendamping Desa/Gampong dan unsur pemerintahan kantor kecamatan sebagai narasumber dalam pelatihan bagi aparatur gampong.
2. Merumuskan program kegiatan Gampong dalam Rapat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Rapat RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Kegiatan ini dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang dan tentunya mendapat persetujuan dari semua anggota masyarakat. Prosesnya diawali dengan meminta usulan program dari masyarakat, di mana semua usulan program ditampung dan dimusyawarahkan program apa yang akan dijalankan. Tentunya tahapan ini mengambil pendekatan atau berprinsip pada skala prioritas. Setelah disepakati program yang akan dikerjakan, maka para perangkat dan aparatur Gampong diberikan tugas masing-masing yang bertanggungjawab terhadap program yang telah disepakati bersama.
3. Menyusun Anggaran Belanja Gampong yang tepat sasaran dan tepat guna. Ini dilakukan dalam musyawarah ditingkat Gampong, dihadiri oleh semua masyarakat dan juga di bawah bimbingan tenaga pendamping desa/gampong.
4. Mencetuskan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), yang kemudian di beri nama dengan *BUM Desa Beumeusaree Seujahtera Mee Panyang*.
5. Mengurus Legalitas sertifikasi BUMG sehingga dapat diplot anggaran pemberdayaan dari Dana Gampong. Legalitas tersebut sudah ada dengan terbitnya Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Nomor AHU-00405.AH.01.33.Tahun 2023, pada tanggal 19 Januari 2023, dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
6. Menggalang Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program BUMG dan kewiraswastaan. Hal ini dilakukan untuk menutupi keterbatasan anggaran yang dimiliki. Usaha yang telah dijalankan adalah jasa

percetakan, tentunya membutuhkan modal yang besar, maka butuh kucuran dana dari beberapa rekanan untuk membuka usaha tersebut, mengingat dana Gampong tidak mencukupi untuk membuka usaha tersebut. Untuk tahap awal hingga dibukanya usaha percetakan, modal yang dibutuhkan lebih kurang Rp. 1 Milyar; 30% berasal dari dana Gampong dan sisanya 70% adalah hasil pinjaman dari beberapa orang masyarakat Gampong Mee Panyang Busu yang sudah sukses menjadi pengusaha di pusat Kota. Para masyarakat penyedia modal ini bersedia meminjamkan uangnya dalam jumlah yang banyak, karena melihat keseriusan Keusyik dan perangkat Gampong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menariknya, beberapa orang masyarakat yang meminjamkan modalnya ini tidak mengharapkan bagi hasil dari keuntungan usaha. Tetapi mereka secara sukarela meminjamkan modal usaha, dan dikembalikan modal tersebut sejumlah yang diponjamkan. Ini merupakan sebuah kerjasama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

7. Melatih Sumber Daya Manusia (SDM) dari unsur kepemudaan yang akan ditugaskan untuk mengelola usaha di bawah naungan BUMG. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong itu sendiri. Mereka terlebih dahulu diberikan pelatihan dan Pendidikan, kemudian dipekerjakan untuk mengelola dan menjalankan usaha percetakan tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Mee Panyang Busu beserta para perangkat gampong dan masyarakat secara umum adalah sebuah inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Artinya anggota masyarakat yang dipekerjakan akan diberikan gaji, yang tentunya akan berdampak baik pada pendapatan masyarakat dan tingkat perekonomian masyarakat.

4. PENUTUP

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh keusyiek (Kepala Desa) Bersama dengan para perangkat dan aparatur Gampong, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikan dan mengembang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bernama *BUM Desa Beumeusaree Seujahtera Mee Panyang*. Badan usaha tersebut sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, artinya sudah legal formal. Sekarang ini, mereka sudah membuka usaha percetakan di bawah naungan BUM Desa tersebut. Ini merupakan sebuah terobosan yang inovasi yang perlu dicontohi oleh kepala desa lainnya, sehingga dana Gampong tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Gampong (Desa), sebagaimana dilakukan oleh Keuchik Gampong Mee Panya Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ahmad Safei. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Erni Rermawan. (2011) *Organization Culture, Budaya Organisasi Dalam Perpekstif Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- I Nyoman Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Mardikanto P dan Soebiato P (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Purwadarminta (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahmi Yuliana dan Eko Sasono (2015). *Kekuasaan Dan Pemberdayaan Dalam Organisasi*. Jurnal STIE Semarang 7(2).
- Sutarto (2015). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yoyakarta: Gadjah Mada University Press
- Totok Mardikanto (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta